



BAB II

KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, baik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015.

Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh *stakeholder* pembangunan, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015.

a. Visi

Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi. Visi umumnya masih bersifat umum dan luas. Visi menjelaskan kemana organisasi akan berjalan dalam bentuk konseptual dan sangat umum. Akan tetapi, juga menyediakan arahan emosional. Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi.



Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah

”Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”.

Sehubungan dengan itu, Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015 adalah :

“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Selanjutnya, Visi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat yang mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 komponen, yaitu : lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Dari kondisi ini, diharapkan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada pencapaian taraf puncak baik lahir maupun batin.
- b) **Mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sedangkan pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar. Terdapat lima indikator bagi terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri, yaitu:
 1. Rasio PAD terhadap APBD ≥ 20 %, ini berarti pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan.



2. Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin kecil rasio ini menggambarkan semakin mandirinya daerah.
 3. Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti Pemerintah daerah selalu berupaya mendorong pembangunan di sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial sehingga kontribusinya pada perekonomian daerah bisa lebih nyata dirasakan.
 4. Perimbangan perbandingan income perkapita dengan kebutuhan hidup masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk / masyarakat dapat hidup secara layak akibat terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya dari pendapatan yang diperolehnya.
 5. Surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), ini berarti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah harus relatif tinggi sehingga surplus bila digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran terhadap hutang-hutang daerah.
- c) **Berkeadilan** adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh partisipasi seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serta diukur dengan indeks ketimpangan antar wilayah.

b. Misi

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Perumusan misi dilakukan bersama oleh perwakilan dari seluruh SKPD dan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal (kesempatan (Opportunity) dan ancaman (Threat)) dan kemampuan internal (kekuatan (Strong) dan kelemahan (Weakness)) Kabupaten Sidoarjo.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 dijabarkan ke dalam 8 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan



sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri.

Adapun 8 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera harus dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi.

Misi 2: Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Misi 3: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.



Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.

Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 5: Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi 6: Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Sidoarjo adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Misi 7: Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan



lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Misi 8: Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

Mengembangkan demokrasi, norma, dan etika masyarakat merupakan upaya menuju Kabupaten Sidoarjo yang demokratis, mandiri dan sejahtera. Perlu adanya upaya yang serius dan intens dari segenap aparatur daerah untuk mensosialisasikan cara-cara demokrasi yang ideal secara simultan dan berkelanjutan.

2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

a. Strategi

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015 merumuskan 8 strategi yang diharapkan akan mampu membawa kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan masyarakat.

Strategi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu bagian visi pemerintah dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan



kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tidak hanya kemiskinan yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, namun sektor pendidikan serta kesehatan mempunyai peran yang sangat penting.

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dalam menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional, sehingga secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik dari yang normal maupun yang berkelainan, yang mampu maupun yang tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setidaknya sesuai anjuran pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun.

Di bidang kesehatan, upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat, baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga yang miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan, harus menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo.



Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor penting juga yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan.

Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembangunan dan Puskesmas keliling, bisa merupakan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengoptimalkan pemanfaatannya. Meskipun fasilitas Puskesmas terdapat hampir di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ini masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang sekiranya mempunyai beban dalam hal biaya berobat dan jarak tempuh transportasinya.

Berbagai sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo harus dibentuk agar dalam pelaksanaannya langsung mempunyai dampak terhadap masyarakat. Beberapa masukan dan saran mengenai sasaran pembangunan kesehatan di masyarakat Sidoarjo yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa melalui posyandu dan puskesmas.



Strategi II : Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata

Pembangunan di bidang industri menghadapi tantangan kedepannya. Berbagai hal seperti kesiapan pemerintah di bidang regulasi, serta permodalan merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan investasi serta infrastruktur daerah. Kabupaten Sidoarjo terkenal dalam hal perikanan, sehingga sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah agar hasil perikanannya terus optimal.

Pembangunan pertanian mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan hasil produksi pertanian serta perikanan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan sektor pertanian dan perikanan diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, dan diharapkan bisa menjadi titik pusat sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan agrobisnis terutama agroindustri juga mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar, serta mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja. Namun kedepannya pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna harus dioptimalkan, karena terjadi tren penurunan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian. Beberapa masalah yang akan dihadapi juga seperti permasalahan kelangkaan pupuk pada saat masa tanam, serta rendahnya harga pada saat panen raya merupakan permasalahan klasik yang perlu penanganan terpadu antar sektor. Sehingga kebutuhan pupuk dalam jumlah, jenis, lokasi dan waktu harus selalu terpantau dan pendistribusian secara tepat dapat terlaksana.

Pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis. Karena sektor tersebut memiliki peranan yang besar



dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta berbagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan UMKM yang merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi-sosial penduduk.

Dalam masa krisis, usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah telah memperlihatkan ketangguhannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kedepan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan pada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah.

Potensi industri kecil kerajinan yang strategis, telah dilakukan pembinaan dalam bentuk sentra industri dan “kampoeng” perlu terus dikembangkan.

Kemampuan UKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKM yang harus kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar dan tingkat kewirausahaan. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar dan kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat serta perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKM. Saat ini perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kedua kondisi tersebut.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh yang mampu menggerakkan sektor riil, dan secara bertahap dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.



Strategi III : Meningkatkan modal sosial, kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat

Konsisten dengan misi ketiga yang mengacu pada tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, maka diperlukan sebuah langkah untuk mencapainya, yaitu dengan memperkuat modal sosial melalui kegiatan sosial masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat. Terciptanya ketertiban masyarakat ini menjadi syarat mutlak tumbuhnya investasi di suatu daerah, hal ini untuk menarik investor dari dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal investor di daerah tersebut akan membawa dampak positif pada tingkat perekonomian masyarakat sekitar.

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal bahkan hingga terorisme.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat harus diantisipasi. Meskipun upaya-upaya menjaga ketentraman dan ketertiban telah mampu menciptakan iklim yang relatif kondusif, namun besarnya wilayah Kabupaten Sidoarjo, ketentraman dan penanggulangan kriminalitas masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi prioritas untuk diantisipasi dan diselesaikan. Meningkatnya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat, kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai dampak dari masalah ekonomi maupun globalisasi informasi. Bila tidak dilakukan antisipasi secara dini akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan ketentraman masyarakat.

Strategi IV : Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam kondisi seperti itu,



pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan yang ditujukan pada kedudukan dan peranan perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan. Sehingga mampu menjadi mitra sejajar laki-laki. Kebijakan ini dilakukan secara lintas bidang/program, lintas lembaga, dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan mengupayakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) pada kebijakan dan program pembangunan. Langkah ini dilakukan di setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Salah satu permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum responsif sehingga perempuan yang paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal lainnya, serta tindak kekerasan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tampaknya belum mampu menumbuhkan komitmen dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Adanya permasalahan dan hambatan yang cukup besar dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo antara lain mengenai pemahaman kesetaraan dan keadilan gender di kalangan pengambil kebijakan dan pelaksana program. Selain itu juga belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak



dalam upaya PUG. Sehingga PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah.

Peran serta dari masyarakat menjadi pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah. Diiringi dengan inovasi yang muncul dari masyarakat, diharapkan, masyarakat memiliki andil dalam pembangunan. Inovasi-inovasi masyarakat akan sangat membantu pemerintahan dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang berbasis masyarakat. Sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya, keadilan gender menjadi target dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan persentase gender wanita dalam struktur pemerintahan.

Ada beberapa saran mengenai sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan adalah peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan peran perempuan.

Dalam kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarki) dan bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada), diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi V : Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur

Desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sementara dampak terhadap birokrasi adalah harapan atas penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat serta lebih baik. Sejalan dengan misi kelima tentang peningkatan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima, mendorong setiap aparatur untuk berbenah diri dan berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan



terlebih dahulu meningkatkan profesionalisme aparatur. Akuntabilitas dan transparansi aparatur menjadi sorotan utama masyarakat. Tuntutan masyarakat menjadi tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintahan.

Pemerintah sebagai *public service* harus mewujudkan tugas pelayanan dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hatinurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan (transparansi), efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya memberikan *public service excellence* kepada masyarakat. Sehingga capaian yang diinginkan adalah terbentuknya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi VI : Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi

Di sektor jasa, dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini tidak lepas dari peran sektor perdagangan barang dan jasa. Sektor jasa akan berkembang, apabila kota tersebut mempunyai tingkat perdagangan yang cukup ramai. Contohnya seperti jasa telekomunikasi, jasa kurir antar barang, dan lain sebagainya sebagai wujud terciptanya perdagangan yang maju.

Sektor industri juga masih cukup besar kontribusinya terhadap PDRB, sehingga perlu tetap didukung untuk pengembangan investasinya. Namun diarahkan pada industri yang mendukung konsep Agropolitan.



Dengan keadaan yang maju tersebut, diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan investasi dan perdagangan lokal, regional, dan internasional ditunjukkan dalam besarnya angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta besarnya Penanaman Modal Asing. Kenaikan atau penurunan jumlah investasi harus dilihat secara rinci. Apakah terdapat kenaikan/penurunan investor yang menanamkan modalnya, atau hanya sebatas perluasan industri lokal saja. Terlebih nilai investasi di sektor industri, dimana baik secara langsung maupun tak langsung mempunyai dampak terhadap terwujudnya sasaran pembangunan peningkatan investasi, peningkatan bidang ketenagakerjaan dan produktivitas, serta bidang ekonomi daerah lainnya yang dapat menunjang sektor infrastruktur daerah.

Apabila peran pemerintah serta peran sektor swasta dapat memberikan sumbangsih yang layak terhadap penerimaan Kabupaten, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi, dan langkah selanjutnya adalah pemerataan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa poin penting mengenai pemerataan infrastruktur adalah pemerataan jalan beraspal, lampu penerangan jalan, pemerataan jalur komunikasi telepon, dan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.

Sehingga bisa diraih sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan perdagangan serta pembangunan infrastruktur daerah yang kondusif dan terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai potensi daerah. Sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat agar dapat memicu pertumbuhan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Strategi VII : Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Kabupaten Sidoarjo mengalami bencana letusan lumpur (*mud volcano*) akibat kegagalan proyek penambangan gas yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini bisa kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan yaitu lumpur yang keluar ke permukaan tersebut merendam perkampungan warga, bahkan beberapa desa hilang dari peta karena lumpur telah menenggelamkan perumahan di beberapa desa. Selain berdampak dalam hilangnya rumah-rumah warga, ternyata dampak negatif muncul dalam hal pengairan air sungai. Sungai yang pada awalnya layak untuk digunakan warga mengairi sawah maupun kegiatan sehari-hari, kondisi saat ini bisa



dikatakan sangat tidak layak. Karena beberapa sungai utama seperti Sungai Brantas terdapat endapan lumpur yang berasal dari bencana di atas..

Untuk bencana lumpur Lapindo, penanganan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (BPLS). Peran Kabupaten Sidoarjo adalah memfasilitasi dan melakukan mediasi permasalahan sosial yang dialami warga kepada Pemerintah Pusat. Untuk masalah infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kegiatan-kegiatan lain yang diluar kewenangan Pemerintah Pusat sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak melalui suatu program khusus dengan nomenklatur penanganan Lapindo, tetapi tersebar melalui beberapa kegiatan yang merupakan turunan program kerja yang dimiliki oleh SKPD.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah tidak hanya sebatas pada penanganan bencana serta pemulihan lingkungannya, namun juga beberapa aspek permasalahan yang potensial terjadi di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah kebutuhan air bersih, pengelolaan dan pengoptimalisasi sumber daya alam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian alam dan penegakan hukum di bidang lingkungan.

Beberapa masyarakat yang jauh dari sistem saluran air bersih, masih memanfaatkan air sumur tanah. Walaupun bisa dikatakan sudah dapat tercukupinya kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari, namun muncul permasalahan yang pelik jika datangnya musim kemarau. Air sumur dan air sungai akan mengering akibat musim kemarau. Sehingga menyebabkan krisis air bersih di masyarakat yang belum dilalui sistem air bersih kota. Hal ini merupakan permasalahan utama dalam pemerataan penyediaan air bersih untuk masyarakat Sidoarjo.

Tak hanya kemarau, musim hujan pun juga mendatangkan masalah yang sama. Jawa Timur yang akhir-akhir ini sering dilanda hujan deras, terutama kota Sidoarjo dan beberapa kota lainnya, menyebabkan masalah banjir. Hal ini dapat mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Penyebabnya bisa mulai dari sampah yang menghambat saluran air kota, maupun penanganan air banjir yang kurang optimal.



Beberapa permasalahan yang terlihat maupun yang tak terlihat, harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan beberapa langkah harus segera dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Strategi VIII : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal.

Untuk itu perlunya dibentuk beberapa langkah yang dianggap dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan hal dasar yang harus dibangun di dalam kehidupan politik bermasyarakat. Seperti Pemilu Kepala Daerah atau Pemilukada, dimana tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi dan seminim mungkin tidak ada yang golput.

Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar, yaitu ditunjukkan oleh terlaksananya PILKADA Langsung. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang politik hanya bersifat membantu membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Hasil pelaksanaan pembinaan politik kepada masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan forum wawasan kebangsaan.

Secara umum dapat dikatakan, masyarakat tampak makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan politik kepentingan golongan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah model awal yang baik bagi demokratisasi. Teladan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas dan keikutsertaan



(partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan pembangunan politik ditandai dengan semakin meningkatnya arus demokratisasi telah membawa implikasi pada berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti dinamika perubahan politik yang dinamis sehingga menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran lembaga legislatif sebagai wahan representasi politik masyarakat, adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat.

Dari beberapa langkah yang ada, diharapkan dapat terlaksananya peran dan kelembagaan yang lebih kokoh melalui peran dan fungsi lembaga politik, kemasyarakatan, pers, dan pemerintahan dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD, Parpol, LSM, dan Masyarakat. Serta yang terpenting bahwa partisipasi masyarakat harus meningkat dalam proses pengambilan keputusan dalam berpolitik. Seperti pemilihan kepala daerah, maupun keputusan kebijakan publik melalui forum publik.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Tabel II.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo

VISI			
“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”			
MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)	1. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat 2. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.	1. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat 2. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan daya saing bidang sumber daya manusia	4. Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia		3. Peningkatan daya saing sumber daya manusia 4. Peningkatan daya beli masyarakat 5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
MISI II : Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan potensi dan daya saing daerah 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi	1. Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi 2. Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.	Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomikontribusi sektor UMKM dan koperasi, pariwisata, industri perdagangan, jasa, dan pertanian pada PDRB melalui peningkatan daya saing.



		koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata	
MISI III : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman	1. Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian 2. Peningkatan ketertiban masyarakat	Meningkatkan modal sosial, kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan modal sosial pembangunan 2. Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara konsisten dan berkelanjutan
MISI IV : Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	1. Peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan 2. Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek	Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender	1. Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat 2. Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan
MISI V : Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan transparansi, profesionalisme dan produktivitas aparatur	1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan 20 sistem yang adil dan merata 2. Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur	1. Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah melalui <i>public service excellence</i> . 2. Peningkatan produktivitas aparatur 3. Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi



			4. Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi
2. Peningkatan pelayanan publik	3. Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah		5. Pengembangan data dan sistem IT pendukung pelayanan umum 6. Pengelolaan tata laksana pemerintah secara efektif
MISI VI : Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi 2. Optimalisasi Pembangunan infrastruktur daerah	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 2. Peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN 3. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi	1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah 2. Pengembangan investasi berdaya dukung tinggi 3. Pengembangan sumber- sumber dana pembangunan
MISI VII : Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup	1. Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan	Pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Peningkatan efektivitas penanganan bencana 2. Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup



	2. Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota		
MISI VIII : Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1. Menumbuh kembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik	1. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan norma maupun etika 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pilpres dan Pilkada	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik 2. Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

c. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 8 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

1) Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- b) Peningkatan daya saing bidang sumber daya manusia
- c) Peningkatan potensi dan daya saing daerah
- d) Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- e) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman
- f) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.
- g) Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur.
- h) Peningkatan pelayanan publik
- i) Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi
- j) Optimalisasi Pembangunan infrastruktur daerah
- k) Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.



- l) Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik.
- 2) Sasaran
 - 1) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
 - 2) Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
 - 3) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
 - 4) Peningkatan produktivitas sumber daya manusia
 - 5) Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi
 - 6) Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.
 - 7) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian
 - 8) Peningkatan ketertiban masyarakat
 - 9) Peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
 - 10) Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek
 - 11) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata
 - 12) Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi
 - 13) Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
 - 14) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
 - 15) Peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN
 - 16) Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
 - 17) Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
 - 18) Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota
 - 19) Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan norma maupun etika
 - 20) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelpres dan Pilkada.



3. PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2014 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015. Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2013 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2014. Prioritas pembangunan tahun 2014 ini adalah sebuah alat untuk mengarahkan pola pembangunan yang dapat berupa program dan kegiatan menuju satu sasaran pencapaian selama satu tahun kedepan.

Fokus pada prioritas pembangunan 2014 ditetapkan berdasarkan penjabaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menampilkan pemahaman secara mendalam tentang arah daripada prioritas tersebut. Dengan fokus yang ada didalam prioritas ini diharapkan mampu mengarahkan semua SKPD untuk menempatkan fungsinya dan mengambil peran sesuai dengan indikasi program. Berikut ini adalah gambaran prioritas, fokus serta program pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 :

Prioritas 1 : Peningkatan investasi dan ekonomi lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

- a. Iklim investasi
 1. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 3. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 4. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- b. Pemberdayaan ekonomi lokal
 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 2. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
 3. Pengembangan Budidaya Perikanan
 4. Pengembangan Perikanan Tangkap
 5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan



6. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Pengembangan Pengelola Tambak dan Hasil Tambak
8. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Kondusif
9. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
10. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12. Pengembangan Teknologi, Pemanfaatan Energi
13. Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat
14. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
15. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
16. Peningkatan Pasar
17. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
18. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Rokok/Hasil Tembakau
19. Penumbuhan Wirausaha di Bidang Industri Rokok
20. Pemberdayaan Skala Mikro Kecil Menengah
21. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
22. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
23. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
24. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
25. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
26. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
27. Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan
28. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
29. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
30. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
31. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
32. Peningkatan Kesempatan Kerja
33. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
34. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor



c. Infrastruktur pendukung

1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Pengembangan Perumahan
3. Lingkungan Sehat Perumahan
4. Pembangunan Jalan dan Jembatan
5. Peningkatan Jalan dan Jembatan
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
9. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
10. Pengembangan Wilayah Perbatasan
11. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
12. Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Pengelolaan Areal Pemakaman
14. Penerangan Jalan dan Lingkungan
15. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
18. Pembangunan Saluran dan Trotoar
19. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Trotoar
20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
21. Pengembangan Lingkungan Sehat

d. Alternatif pembiayaan pembangunan

1. Kerjasama Pembangunan

Prioritas 2 : Peningkatan daya saing SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun



3. Pendidikan Menengah
 4. Pendidikan Non Formal
 5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 6. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 7. Manajemen Pelayanan Pendidikan
 8. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
 9. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
 10. Obat dan Perbekalan Kesehatan
 11. Upaya Kesehatan Masyarakat
 12. Pengawasan Obat dan Makanan
 13. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 14. Perbaikan Gizi Masyarakat
 15. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 16. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 17. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 19. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
 21. Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
 22. Kesehatan Reproduksi Remaja
 23. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
 24. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 25. Upaya Pencegahan Penanggulangan Narkoba
 26. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 27. Peningkatan Pelayanan ASKES
- b. Daya beli masyarakat
1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 2. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan



c. Reformasi birokrasi

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
7. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
8. Pendidikan Kedinasan
9. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
10. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
12. Peningkatan Kualitas/Mutu Pengelolaan Jasa Keuangan
13. Pemeliharaan Ruitn/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
14. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peningkatan Pelayanan Angkutan
16. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
18. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
19. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
21. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
22. Pengembangan Nilai-Nilai Otda
23. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana
24. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
25. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
26. Kelembagaan Diklat Aparat dan Masyarakat Serta Pelayanan Prima
27. Peningkatan Disiplin Aparatur



28. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemdes
 29. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Data dan system IT pendukung
1. Pembangunan Sistem Informasi/Database Jaringan Irigasi
 2. Pengembangan Data/Informasi
 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 5. Sistem Informasi Lingkungan
 6. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Kelautan dan Perikanan
 7. Inventarisasi Data Pengguna Air Tanah dan Ketenagalistrikan
 8. Pengolahan Data dan Informasi Program KBPMP
 9. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
 10. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
 11. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 12. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 13. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 14. Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
- e. Manajemen kependudukan
1. Keluarga Berencana (KB)
 2. Pelayanan Kontrasepsi
 3. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 4. Penataan Administrasi Kependudukan

Prioritas 3 : Peningkatan modal sosial pembangunan, penegakan supremasi hukum, pemerataan dan peningkatan peran wanita dalam pembangunan. Prioritas 3 mempunyai fokus sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan
1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 3. Pembinaan Anak Terlantar



4. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- b. Penegakan Supremasi Hukum
 1. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 3. Bantuan Hukum
 4. Dokumentasi Hukum
 5. Penerapan Ketentuan Terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual
 6. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- c. Kelestarian budaya lokal (gotong royong, musyawarah, kerukunan antar umat beragama)
 1. Perencanaan Sosial dan Budaya
 2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 5. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama, Bantuan dan Pembinaan di Bidang Agama
 6. Peningkatan Bantuan Masyarakat Miskin serta Penanganan Kemiskinan dan Masalah Sosial Lainnya
 7. Perumusan dan Monev Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 8. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 9. Pengembangan Nilai Budaya
 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya
 11. Pengelolaan Keragaman Budaya
 12. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 13. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 14. Pengembangan Destinasi Pariwisata
 15. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda



- d. Partisipasi masyarakat dan gender
 - 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - 4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - 5. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - 6. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
 - 7. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - 8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Pedesaan

Prioritas 4 : Optimalisasi Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Mengacu Pada Kebijakan Tata Ruang dan Efektivitas Penanganan Bencana. Fokus dari prioritas 4 ini antara lain:

- a. Pengendalian lingkungan
 - 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 3. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
 - 4. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 5. Peningkatan Pengendalian Polusi
 - 6. Perlindungan dan Konservasi Kawasan Pesisir
 - 7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - 8. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- b. Perencanaan dan pengawasan tata ruang
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 2. Perencanaan Tata Ruang
- c. Penanganan Bencana
 - 1. Pengendalian Banjir
 - 2. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
 - 3. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam



d. Database Sumber Daya Alam

1. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Prioritas 5 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Berpolitik dan Meningkatkan Iklim Demokrasi yang Sehat. Fokus dari prioritas 5 ini antara lain :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Pendidikan Politik Masyarakat
6. Pengembangan Kemitraan
7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah